

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi di Indonesia dimulai pada tahun 2001 dengan mengalihkan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 32 tahun 2004) yang telah mengalami perubahan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya UU tersebut dapat memberikan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, hal ini dapat diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan, serta perimbangan keuangan pemerintah daerah dan keuangan pemerintah pusat yang demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Tujuan dengan adanya kewenangan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial.

UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan lagi dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan antar susunan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan

memberikan kewenangan kepada daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola yang baik dengan adanya sistem pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan pemerintah daerah dalam waktu yang telah ditetapkan.

Didalam UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap kepala daerah wajib memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No.3 tahun 2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, pasal 2 menjelaskan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintah. Lebih lanjut sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 (Permendagri No. 73 tahun 2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 5 menyebutkan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EKPPD) menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. (Sudarsana, 2013)

Menurut Soeprapto (2013) dalam Nanda(2017)terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan program pengembangan kapasitas dalam pemerintah daerah, namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks otonomi daerah faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan kapasitas meliputi hal pokok yaitu, komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah menyusun anggaran keuangan yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran dalam pemerintah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barangdan jasa harus dianggarkan. Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, Menteri keuangan selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan negara, para Menteri/Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan para Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah

Terkait dalam hal itu, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada pemberi amanat

yang berupa akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah atas kewenangannya dalam mengelola sumber daya yang ada.

Untuk mengetahui kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah diperlukan penilaian yang dilakukan oleh lembaga negara yang kompeten. Sesuai Peraturan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setidaknya ada dua tugas penting yang diamanatkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yaitu (1) melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah, (2) melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian Intern. Selain itu, diperkuat dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Novyandra, (2016) variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh belanja modal, *Intergovernmental revenue*, *leverage*, *size*, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini variabel independen *leverage* di hilangkan dan menambahkan variabel independen temuan Audit BPK dari penelitian Nanda, (2017).

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP**

KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN ANGGARAN 2015-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisis tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun Anggaran 2015-2016, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota?
2. Apakah kekayaan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota?
3. Apakah ketergantungan daerah berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota?
4. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota?
5. Apakah temuan Audit BPK berpengaruh terhadap skor kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan:

1. Menganalisis pengaruh ukuran daerah terhadap skor kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
2. Menganalisis pengaruh kekayaan daerah terhadap skor kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
3. Menganalisis pengaruh ketergantungan daerah terhadap skor kinerja keuangan kabupaten/kota.
4. Menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap skor kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.
5. Menganalisis pengaruh temuan Audit BPK terhadap skor kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota.

D. Manfaat Penelitian

Hal terpenting dari penelitian adalah kemanfaatan yang diperoleh dari hasil penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Bagi pemerintah daerah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan keuangan pemerintah daerah masa yang akan datang yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan efisiensi anggaran.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat terkait kinerja keuangan pemerintah daerah

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca dalam memahami kinerja keuangan pemerintah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian ini, sistematika penulisan disusun secara urut yang terdiri dari:

BAB 1 Pendahuluan

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis dan kerangka penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab tiga menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Dalam bab ini, diuraikan mengenai jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab empat merupakan inti dari penelitian ini, yang berisi hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab lima berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN